



	<b>Kerawanan Bencana di Objek Wisata Harus Diperhatikan</b>					
<b>TAJUK</b>	<p><b>M</b>enurut Koordinator Program Studi Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Eko Teguh Paripurno, banyak objek wisata di DIY berada di kawasan rawan bencana. Parahnya, tempat-tempat tersebut justru minim penanganan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana baik tanah longsor, luapan air sungai, erupsi Gunung Merapi, maupun saat terjadi gelombang tinggi air laut.</p> <p>Di Bantul, Eko menyebutkan sejumlah objek wisata yang rawan bencana longsor ada di kawasan Mangunan, Kapanewon Dlingo dan</p>	<p>sekitarnya karena berada di kawasan tebing yang membahayakan. Kemudian juga kawasan Bukit Bintang atau perbatasan Bantul dan Gunungkidul yang berlokasi di Kapanewon Piyungan. Di Sleman ada di kawasan lereng Merapi, dan wisata di sempadan sungai di Sleman, Bantul, Kota Jogja dan Gunungkidul. Selain itu, hampir sebagian tempat wisata melanggar tata ruang.</p> <p>Pengelola wisata juga tidak memiliki pengetahuan dan penanganan keselamatan bagi pengunjung ketika terjadi bencana. Kondisi itu diperparah dengan</p>	<p>sikap pemerintah daerah cenderung permisif terhadap kondisi objek wisata yang rawan bencana tersebut. Tidak ada semacam <i>punishment</i> ketika investor atau pengelola mengelola wisata, dan selanjutnya tidak memiliki rencana bagaimana penanganan ketika terjadi bencana. Akibatnya, keamanan pengunjung terabaikan.</p> <p>Perlu ketegasan Pemda DIY, dan pemerintah daerah di wilayah DIY, untuk tidak hanya mengejar target ekonomi dan investasi. Keamanan wisatawan harus diperhatikan. Izin pembukaan objek wisata</p>	<p>perlu diperketat. Rencana tata ruang harus benar-benar diperhatikan.</p> <p>Pemerintah dan pengelola objek wisata perlu memperhatikan dan menerapkan mitigasi bencana. Pengelola kawasan wisata bisa memberikan rasa aman dan nyaman, kepada wisatawan. Apabila ada bencana yang datang di obwis, minimal pengelola bisa mengarahkan wisatawan ke zona penyelamatan evakuasi.</p> <p>Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebenarnya sudah menyusun Panduan Mitigasi Bencana di destinasi pariwisata yang rawan bencana untuk</p>	<p>meminimalisasi risiko yang mungkin timbul saat terjadi bencana. Pengembangan kawasan pariwisata, khususnya destinasi wisata alam, tidak dapat dipisahkan dari mitigasi bencana.</p> <p>Selain itu, mengembangkan kawasan pariwisata secara masif bila tanpa menyiapkan mitigasi bencana dapat berkonsekuensi pada meningkatnya risiko atau potensi dampak kerugian dan korban akibat bencana pada masa mendatang. Hal ketiga yakni Indonesia rawan terhadap bencana dan sebagian besar destinasi pariwisata terletak di kawasan rawan bencana</p>	<p>sehingga perlu ada strategi dan kebijakan untuk mengurangi dampak dari bencana.</p> <p>Selanjutnya mitigasi struktural dan non-struktural untuk destinasi rawan bencana banjir dan tanah longsor yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan</p> <p>Mitigasi struktural meliputi pemetaan kawasan rawan bencana, penegakan pemanfaatan ruang berdasarkan peta KRB, menyediakan penunjuk arah evakuasi dan titik kumpul di daerah-daerah rawan membangun sistem peringatan dini, dan penggunaan teknologi.</p>

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005